



BPR SYARIAH
HIK

GRUP HIK

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	2
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. Cakupan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	6
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	9
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	11
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	13
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	14
D. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, Dan/Atau Pemegang Saham BPRS	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	15
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS Yang Bersangkutan Dan Perusahaan Lain .	15
F. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPRS	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	16
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	16
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada BPRS, BPRS Lain, Dan/Atau Lembaga Atau Perusahaan Lain	16
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS Sebagai DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	16
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Rups	17
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	18
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	18
1. Peleenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	18
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	21
L. Frekuensi Rapat DPS.....	21
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	21
2. Kehadiran Anggota DPS	24
M. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud).....	24
N. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRS.....	24
O. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	25
P. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	25

BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat Kantor	: Menara HIK, Jalan HOS Cokroaminoto No 17 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
No. Telepon	: 021-730 1456
Penjelasan Umum	<p>: Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, dan Kewajaran.</p> <p>Adapun Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di BPRS bertujuan antara lain untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kinerja BPRS dengan menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan BPRS sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis BPRS yang telah ditetapkan.2. Menjaga agar kegiatan operasional BPRS mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPRS4. Memperbaiki budaya kinerja BPRS. <p>Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka BPRS membuat Laporan Penerapan Tata Kelola yang didalamnya termasuk Laporan <i>Self-Assessment</i> (Penilaian Sendiri) atas Pelaksanaan Tata Kelola untuk posisi Desember 2023.</p>

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Penerapan Tata Kelola di BPRS Harta Insan Karimah disusun berdasarkan ketentuan POJK nomor 28/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola BPRS dan SEOJK Nomor 09/POJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola. Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS HIK tahun 2023 sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. CAKUPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Harta Insan Karimah, Akta Notaris Nomor 06 tanggal 10 April 2023 perihal susunan pengurusan PT BPRS HIK sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Alfi Wijaya	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi dan arah kebijakan Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. 2. Menyusun strategi dan arah kebijakan strategis terkait penyelesaian nasabah bermasalah, <i>corporate innovation & project management</i> serta audit intern. 3. Melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BPRS dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Menjalankan pengelolaan perusahaan harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 5. Menerapkan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS. 8. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas Divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Intern), Departemen <i>Corporate Innovation & Project Management</i> serta bagian

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p><i>Remedial & Recovery.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Utama berjalan dengan baik. 10. Melakukan persetujuan atas permohonan pembiayaan, tanggapan komite legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 11. Bersama-sama jajaran Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2.	Rahmat Mauludin	Direktur Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan terkait aspek bisnis. 2. Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang penghimpunan dana (baik produk Tabungan maupun Deposito). 3. Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang penyaluran dana (Pembiayaan), termasuk monitoring proses penagihan angsuran khususnya nasabah lancar dan menjaga nasabah lancar agar tidak flow menjadi nasabah bermasalah. 4. Melakukan monitoring perkembangan bisnis penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan di kantor cabang maupun kantor kas. 5. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas Divisi Bisnis. 6. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Bisnis berjalan dengan baik. 7. Melakukan persetujuan atas permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3.	Denny Satria Irawan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah; serta kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinions</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah. 3. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip Syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaporkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai maupun Direksi BPRS. 5. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. 6. Menyusun strategi dan arah kebijakan Rencana Bisnis sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dalam Bidang Operasional & Legal, Sistem Teknologi Informasi dan <i>Digital Banking, Human Capital & General Services</i> termasuk <i>Building Management, Risk Management & Compliance, Corporate Secretary & Corporate Culture, Corporate Legal & Litigation</i>. Melakukan supervisi langsung termasuk menyusun kebijakan dan prosedur serta melakukan review kinerja unit kerja tersebut. 7. Memastikan kelengkapan dan akurasi serta ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang disampaikan ke OJK, LPS, dan Kantor Instansi lainnya. 8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS HIK, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. 9. Melakukan persetujuan atas transaksi keluar masuk dana dalam limit tertentu dan tanggapan komite legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Direksi telah melakukan upaya ekspansi Dana Pihak Ketiga secara efektif guna mendukung penyaluran pembiayaan, dengan tetap memproduktifkan terlebih dahulu dana penempatan pada bank lain, sehingga Dana Pihak Ketiga pada tahun 2023 tumbuh 11,5%.</p> <p>Direksi telah melakukan upaya untuk dapat mencapai target pembiayaan dan untuk mendukung proses ekspansi bisnis, melalui produk KPRS, Umroh, Haji dan sebagainya, sehingga pembiayaan tumbuh 14,2% YoY.</p> <p>Direksi telah melakukan penguatan manajemen risiko melalui proses Financing Risk Reviewer untuk plafond pembiayaan tertentu serta penyempurnaan berbagai ketentuan SOP terutama untuk pembiayaan komersial UMKM segmen properti.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi	
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS	
4.	Direksi telah melakukan upaya dan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian KSPPS KUMB, dengan terus berkoordinasi dengan mitra KUMB melalui skema pembiayaan channelling baru sehingga marjin yang diperoleh bisa dialokasikan untuk mempercepat penyelesaian pembiayaan yang lama dan meningkatkan mitigasi risiko atas pembiayaan lama dengan meminta tambahan agunan dari KSPPS KUMB.
5.	Direksi telah melakukan pemetaan langkah-langkah dan upaya penyelesaian melalui <i>Project Mumtaz Reborn</i> , yang berfokus pada perbaikan project revitalisasi IT & Operasional bekerjasama dengan vendor dalam pengembangan dan perbaikan sistem dalam seperti otomasi closing, perhitungan PPAP, rasio keuangan dan operasional lainnya.
6.	Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK (<i>adjustment</i> kolektibilitas dan pembentukan PPAP), yang memberikan implikasi terhadap koreksi laba perusahaan, antara lain melalui program Gerakan Efisiensi Nasional (GEN 3.0) dan <i>HIK Efficiency 2023</i> , dimana program ini bertujuan dalam upaya <i>cost efficiency</i> , sehingga dengan adanya koreksi laba akibat temuan OJK tersebut target laba sesuai RBB 2023 masih dapat dicapai.
7.	Direksi telah melakukan langkah-langkah penyelesaian nasabah bermasalah atau penurunan NPF sehingga target NPF per Desember 2023 kurang dari 6,55% dapat tercapai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama & Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi Komisaris Utama untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Dewan Komisaris maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: 6. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan 7. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundangn-Undangan. 8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
2.	Noraini Bawazier	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundangn-Undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3.	Agus Darmawan	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundangn-Undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Kepada Direksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi dapat melakukan upaya yang optimal untuk dapat mencapai target Pembiayaan sebagaimana telah ditetapkan dalam RBB 2023 sebesar Rp.535 milyar, melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 636,1 milyar sehingga target asset lebih dari Rp 700 milyar pada tahun 2023 dapat tercapai. 2. Agar Direksi terus melakukan penguatan proses manajemen risiko atas pembiayaan, terus melakukan inovasi produk serta secara maksimal mencari solusi dan langkah-langkah dalam upaya penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan KSPPS KUMB di BPRS HIK. 3. Agar Direksi terus berupaya secara maksimal dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Digital Banking sehingga dari sisi teknologi harus dilakukan <i>improvement</i> baik segi infrastruktur, <i>human capital</i>, serta segera menindaklanjuti temuan Audit OJK terkait Core Banking System. 4. Agar Direksi dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK Tahun 2023, khususnya pencapaian target RBB 2023 yakni NPF per posisi Desember 2023 < 6,65%, termasuk upaya penyelesaian atas temuan Audit OJK yakni adanya peningkatan biaya PPAP sebesar Rp 1,98milyar.

Rekomendasi Kepada Direksi

5. Agar Direksi terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Insani Perusahaan serta terus melakukan pengendalian biaya dan efisiensi perusahaan sehingga menunjang pencapaian Laba Perusahaan yang ditetapkan sebesar Rp 7,1milyar.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dede Abdul Fatah	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none">1. Menjalankan fungsi Ketua DPS untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas DPS maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris.2. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.
2.	Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.</p> <p>6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.</p>

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi	
1.	DPS telah memberikan Opini Sebanyak 10 Opini dengan pokok pembahasan : Pemberian Ujrah kepada KSPPS KUMB Atas Kerjasama Pembiayaan Channeling, Penggunaan Dana Kebajikan, Dana Zakat & Dana Infak Sodakoh, Layanan Transfer Out, Tabungan Smart, Pembiayaan, Kerjasama Pembiayaan dengan BSAM, Pembiayaan untuk Induk HIK, Pengakuan & Penggunaan Ujrah atau Fee Based Asuransi, Mudharabah Muqayyadah, Penurunan Baki Debet Pembiayaan.
2.	DPS telah memberikan rekomendasi terkait Produk dan Layanan baru BPRS HIK yakni terkait layanan Transfer Out. Fitur produk layanan ini sesuai dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah.
3.	DPS telah memberikan rekomendasi terkait Perubahan Nisbah Dana Pihak Ketiga dapat dilakukan ditengah jangka waktu merujuk Fatwa DSN-MUI No 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
4.	DPS telah memberikan rekomendasi terkait Potongan Pelunasan dalam Murabahah telah diatur dimana Bank boleh memberikan potongan pelunasan bagi Nasabah yang disiplin dalam membayar kewajibannya kepada Bank.
5.	DPS telah memberikan rekomendasi terkait perbaikan terhadap akad penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan uji petik yang telah dilaksanakan serta telah dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah secara semesteran ke OJK.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
213/HIK/VIII/2023	08 Agustus 2023	300/HIK/XII/2023	18 Desember 2023

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	<p>1. Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan pada kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan BPRS pada masa yang akan datang.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p>a. Kebijakan Remunerasi bagi</p>	<p>1. Memberikan rekomendasi mengenai calon pengurus Bank baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>2. Membuat kebijakan Remunerasi bagi Pengurus & Pegawai</p>	<p>1. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk</p>	4 kali

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		<p>Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.</p> <p>4. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan</p>		<p>disampaikan kepada RUPS.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.</p>	

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		anggota Komite Pemantau Risiko.			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian (***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Ketua Komite	Nihil
2	Noraini Bawazier	Komisaris	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil
3	Ida Syofiatulhuda	Human Capital & General Services Department Head	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS Harta Insan Karimah telah melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu : Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Dari ketiga aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum penyaluran dana;
10. Rencana Bisnis BPRS;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.

Adapun hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola BPRS pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,44	Sangat Baik
ANALISIS	
<p>Berdasarkan hasil <i>self-assessment</i>, penerapan Tata Kelola BPRS Harta Insan Karimah telah cukup memenuhi persyaratan Tata Kelola yang ditetapkan dalam POJK 24/POJK.03/2018, sebagai berikut :</p> <p>I. Kesesuaian Saat Ini</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan jumlah Modal Inti BPRS HIK (mulai dari Rp 50 milyar), telah terpenuhi kelengkapan struktur Tata Kelola yakni Formasi 3 (tiga) Anggota Direksi yang salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Formasi 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris yang 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen dan Formasi 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Telah terbentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Telah terlaksananya aktivitas proses Tata Kelola berupa Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Pengawasan Kepatuhan Syariah oleh DPS. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan, dan di hasilkan berbagai dokumen termasuk kewajiban Pelaporan ke Regulator sebagai bentuk proses dan hasil Tata Kelola. <p>II. Identifikasi Masalah</p> <p>BPRS Harta Insan Karimah masih dalam tahap penyelesaian beberapa Prosedur dan perbaikan ketentuan serta Tools kerja lainnya.</p> <p>III. Rencana Tindak Lanjut</p> <p>Akan dilakukan penyelesaian beberapa Prosedur dan perbaikan ketentuan serta Tools kerja lainnya.</p>	

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

No	Nama Anggota Direksi**)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan (tempat bekerja)		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan (***)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Alfi Wijaya	Rp.81.100.000,-	0,17	PT Induk Harta Insan Karimah	0,07
2	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil
3	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil
3	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPRS DAN PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Komisaris**)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan (tempat bekerja)		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	1. BPRS Mitra Cahaya Indonesia (620133) 2. BPRS HIK Cibitung (620020) 3. BPRS HIK Bekasi (620015) 4. PT Induk Harta Insan Karimah	0,27% 1,82% 0,50% 0,35%
2	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	1. BPRS HIK Bekasi (620015) 2. BPRS Mitra Cahaya Indonesia (620133) 3. BPRS HIK Parahyangan (620054) 4. BPRS Hikmah Khazanah (620171) 5. PT Barkun Citra Nusantara	0,39% 2,70% 9,17% 4,12% 25,00%
3	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA KOMISARIS LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Komisaris*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil
2	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil
3	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Komisaris*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Endang Wardiyati - Istri Rais Nur Arief - Anak Ulya Khalid - Anak Salwa Fauzia - Anak
2	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Mohammad Yamin - Saudara Kandung
3	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil

G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPRS LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

No	Nama Anggota Dewan Komisaris**)	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil
2	Noraini Bawazier	PT Barkun Citra Nusantara	Direktur Utama
3	Agus Darmawan	Nihil	Nihil

H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

No	Nama Anggota DPS**)	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1	Dede Abdul Fatah	BPRS Hikmah Bahari (620174) BPRS AI - Barokah (620053)	Ketua DPS Anggota DPS
2	Sutedjo Prihatono	BCA Syariah (536)	Anggota DPS

I. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1	Gaji Pokok	3	1.914.041.213	3	1.075.626.864	2	364.944.828
2	Tunjangan	3	536.423.025	3	232.531.760	2	124.690.631
3	Tantiem	3	312.795.853	3	159.088.688	2	64.160.637
4	Bonus	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
5	Kompensasi Berbasis Saham	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
6	Remunerasi-Lainnya*)	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
	Total Remunerasi		2.763.260.091		1.467.247.312		553.796.096
B	Fasilitas Lain						
1	Perumahan	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
2	Transportasi	3	533.560.372 (1 unit mobil dinas per Direksi)	3	Nihil	2	Nihil
3	Kesehatan	3	43.268.500 (Asuransi Kesehatan + Keluarga inti, MCU + Pasangan)	3	7.878.000 (Fasilitas MCU Komisaris + Pasangan)	2	5.252.000 (Fasilitas MCU DPS + Pasangan)
4	Fasilitas Lain-Lainnya*)	3	60.562.495 (Laptop, HP, Tablet Smartphone)	3	Nihil	2	Nihil
	Total Fasilitas Lain		637.391.367		7.878.000		5.252.000
C	Total						
	Remunerasi dan Fasilitas Lain		3.400.651.458		1.475.125.312		559.048.096

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.42
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.11
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.11
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	4.70
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.50
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	3.02

K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	17 Januari 2023	10	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2022 (Aspek Bisnis).2. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan).3. Laporan Kinerja Perusahaan Tahun 2022 dan Rencana Strategi 2023.4. Pembahasan Penyelamatan dan Penyehatan KSPPS KUMB & Kopjas Danamu.
2	26 Januari 2023	15	<ol style="list-style-type: none">1. Update Progres Penyelamatan dan Penyehatan KSPPS KUMB.2. Pembahasan Progres Pemeriksaan KAP.3. Laporan Uji Coba <i>Self Assessment</i> - Tingkat Kesehatan Bank (RBBR).4. Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022.5. Pembahasan Lainnya.
3	7 Februari 2023	3	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2022.2. Pembahasan Lainnya.
4	17 Februari 2023	8	Pembahasan Persiapan Agenda Silaturahmi Pemegang Saham BPRS HIK Tahun Buku 2022.
5	9 Maret 2023	7	Pembahasan Persiapan RUPS BPRS HIK Tahun Buku 2022.
6	24 Maret 2023	7	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Operasional dan Aspek Kepatuhan.2. Laporan Kinerja Perusahaan Aspek Bisnis.3. Laporan Kinerja Februari 2023 dan Rencana Strategi Maret 2023.4. Pembahasan Lainnya.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
7	10 April 2023	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Laporan Kinerja Perusahaan (Direktorat Operasional dan Kepatuhan). 3. Laporan Kinerja Perusahaan (Triwulan I – 2023). 4. Laporan Pembahasan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (PT Juchanah). 5. Pembahasan Lainnya.
8	16 Mei 2023	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Kinerja Overall & Isu Strategis). 4. Pembahasan Lainnya.
9	13 Juni 2023	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan (Direktorat Operasional dan Kepatuhan). 2. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2023. 3. Pembahasan Lainnya.
10	23 Juni 2023	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Penyesuaian dan Revisi RBB Tahun 2023. 2. Pembahasan Limit Kewenangan Pembiayaan. 3. Pembahasan Rencana Pembiayaan ke Induk HIK. 4. Pembahasan Pemilihan Vendor SMKI ISO 27001. 5. Pembahasan Issue Strategi Lainnya.
11	27 Juli 2023	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2023 dan Rencana Strategi Semester 2 Tahun 2023. 2. Pembahasan Potensi Kolaborasi Bisnis KPRS dengan BSAM. 3. Pembahasan Penyelesaian Nasabah Bermasalah. 4. Pembahasan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 5. Pembahasan Progres Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian KSPPS KUMB. 6. Pembahasan Lainnya.
12	08 Agustus 2023	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembahasan Penyelamatan dan Penyelesaian KSPPS KUMB.
13	29 Agustus 2023	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2023 (Operasional & Kepatuhan). 2. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2023 (Bisnis). 3. Laporan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023. 4. Informasi Lainnya.
14	12 September 2023	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2023 (Aspek Bisnis). 2. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2023 (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023 & Langkah-Langkah Tindak Lanjutnya. 4. Informasi Lainnya.
15	27 September 2023	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Penawaran Jasa Audit KAP Razikun Tarkosunaryo (RTS) untuk Tahun Buku 2023. 2. Pembahasan Progres Update KSPPS KUMB.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembahasan Tindak Lanjut OJK terkait Imbalan Pasca Kerja. 4. Pembahasan Penyelesaian Nasabah Bermasalah. 5. Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023. 6. Pembahasan Persetujuan KAP Tahun 2023. 7. Pembahasan Progress Update KSPPS KUMB.
16	6 Oktober 2023	14	<ul style="list-style-type: none"> 1. Refresh pembahasan progres penyelamatan dan penyehatan KSPPS KUMB dalam agenda Radirkom & DPS (8 Agustus 2023). 2. Pemaparan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) tentang kerjasama antara BPRS HIK dengan KSPPS KUMB oleh Bapak Supardo selaku Lawyer BPRS HIK. 3. Tindaklanjuti Tambahan Agunan Kantor Pusat KSPPS KUMB. 4. Pembahasan Lainnya.
17	17 Oktober 2023	7	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III & Rencana Strategis Triwulan IV tahun 2023. 2. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 3. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 4. Pembahasan dan Informasi Lainnya.
18	7 November 2023	22	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Surat Induk HIK terkait Tanggapan RPOJK BPR/ BPRS. 2. Laporan Surat Induk terkait Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2023. 3. Laporan Progres KSPPS KUMB. 4. Laporan Terkait CV Bhatara Jaya Utama. 5. Pembahasan atau Informasi Lainnya. 6. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 7. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 8. Laporan Kinerja Perusahaan (Kinerja bulan Oktober 2023). 9. Laporan RBB Tahun 2024.
19	23 November 2023	11	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2024. 2. Pembahasan Persiapan RUPSLB Tahun 2023. 3. Informasi Lainnya.
20	5 Desember 2023	13	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RBB Tahun 2024. 2. Pembahasan Nasabah Bermasalah (PT Nady Kara dan PT Biru Sistem). 3. Pembahasan Progres Penyelesaian KSPPS KUMB.
21	14 Desember 2023	18	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Pemaparan Evaluasi Kinerja Bulan November 2023 & Rencana Strategis Desember 2023. 3. Pembahasan Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Bermasalah (PT Biru Sistem, KSPPS KUMB & CV Bhatara). 4. Informasi Lainnya. 5. Pembahasan Progress Penyelesaian Pembiayaan KSPPS KUMB. 6. Pembahasan Rencana Merger.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			7. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Bisnis Bank Tahun 2024. 8. Pembahasan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. 9. Pembahasan Lainnya.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Zahrul Hadiprabowo	14	7	100%
2	Noraini Bawazier	11	9	95%
3	Agus Darmawan	14	7	100%

L. FREKUENSI RAPAT DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	17 Januari 2023	10	1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2022 (Aspek Bisnis). 2. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Kinerja Perusahaan Tahun 2022 dan Rencana Strategi 2023. 4. Pembahasan Penyelamatan dan Penyehatan KSPPS KUMB & Kopjas Danamu
2	26 Januari 2023	15	1. Update Progres Penyelamatan & Penyehatan KSPPS KUMB. 2. Pembahasan Progres Pemeriksaan KAP. 3. Laporan Uji Coba Self Assesment - Tingkat Kesehatan Bank (RBBR). 4. Laporan Penerapan Tata Kelola. 5. Pembahasan Lainnya
3	17 Februari 2023	10	1. Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS Semester II Tahun 2022. 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 Tahun 2022
4	26 Februari 2023	4	1. Pembahasan kerjasama dengan Fintek Ethis. 2. Permintaan Tanggapan DPS oleh KAP
5	24 Maret 2023	2	Pembahasan Pembiayaan melalui Fintech Ethis
6	17 April 2023	11	1. Pembahasan Permohonan Opini Penggunaan Dana Kebajikan, Dana Zakat dan Dana Infak Shodakoh. 2. Pembahasan Permohonan Opini Produk KPRS. 3. Pembahasan Permohonan Opini Transfer Out

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
7	29 Mei 2023	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Permohonan Opini Pembiayaan. 2. Pembahasan Permohonan Opini Tabungan Smart. 3. Pembahasan Pembiayaan Pemilik Rumah Syariah (PPRS). 4. Pembahasan Permohonan Opini DPS Tabungan Smart. 5. Pembahasan Permohonan Opini DPS Pembiayaan 6. Pembahasan Permohonan Opini DPS Kerjasama Pembiayaan HIK & BSAM
8	23 Juni 2023	12	Pembahasan Rencana Pembiayaan ke Induk HIK
9	26 Juni 2023	2	Pembahasan Permohonan Opini DPS Pembiayaan untuk Induk HIK
10	27 Juli 2023	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Semester 1 - 2023 dan Rencana Strategi Semester 2 Tahun 2023. 2. Pembahasan Potensi Kolaborasi Bisnis KPRS dengan BSAM 3. Pembahasan Penyelesaian Nasabah Bermasalah. 4. Pembahasan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 5. Pembahasan Progres Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian KSPPS KUMB. 6. Pembahasan Lainnya
11	08 Agustus 2023	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembahasan Penyelamatan dan Penyelesaian KPPS KUMB. 2. Pembahasan Lanjutan Pemeriksaan Profil Risiko Semester I Tahun 2023. 3. Pembahasan dan Review Ketentuan (SOP) BPRS HIK periode Semester I Tahun 2023.
12	07 September 2023	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS HIK Posisi Pemeriksaan 31 Juli 2023. 2. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum OJK terhadap PT BPRS HIK dengan Posisi Pemeriksaan 31 Juli 2023
13	27 September 2023	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Rekening Pasif/Dormant. 2. Pembahasan Pemaparan Fatwa DSN No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo.
14	06 Oktober 2023	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refresh pembahasan progres penyelamatan dan penyehatan KSPPS KUMB dalam agenda Radirkom & DPS (8 Agustus 2023). 2. Pemaparan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) tentang kerjasama antara BPRS HIK dengan KSPPS KUMB oleh Bapak Supardo selaku Lawyer BPRS HIK. 3. Tindaklanjut Tambahan Agunan Kantor Pusat KSPPS KUMB. 4. Pembahasan Lainnya

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
15	16 Oktober 2023	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Mudharabah Muqayyadah. 2. Pembahasan Pengakuan dan Penggunaan Ujroh Asuransi
16	23 Oktober 2023	2	Pembahasan Tentang Kerjasama dengan BSAM
17	28 Oktober 2023	2	Pembahasan Tentang Mudharabah Muqayyadah
18	07 November 2023	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Laporan Progres KSPPS KUMB. 2. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 4. Laporan Kinerja Perusahaan (Kinerja bulan Oktober 2023). 5. Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024
19	10 November 2023	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Pasca Sosialisasi OJK tentang Pedoman Murabahah dan Fatwa Murabahah tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah sebelum Jatuh Tempo. 2. Progress Mudharabah Muqayyadah. 3. Progress Tindak Lanjut Pasca Review SOP BSAM.
20	11 Desember 2023	10	Permohonan Opini DPS terkait Penurunan Baki Debet Pembiayaan
21	18 Desember 2023	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Case PT Hasanah Hanifa Properti 2. Pembahasan Lanjutan terkait Penurunan Baki Debet Pembiayaan. 3. Pembahasan Lanjutan terkait Review Penyempurnaan SOP Kerjasama BPRS HIK dengan BSAM dalam Pengalihan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah. 4. Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Semester 2.

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota Dewan DPS*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dede Abdul Fatah	14	7	100%
2	Sutedjo Prihatono	15	5	95%

M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) *)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2*	1	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2*	1	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) perbaikan data di tahun sebelumnya

N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPRS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPRS HIK selama periode tahun 2023 adalah 5 (lima) kasus perdata, 2 (dua) kasus Perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan 3 (tiga) kasus Perdata sedang dalam proses penyelesaian. Permasalahan Hukum yang dihadapi HIK disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	2	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	3	Nihil
Total	5	Nihil

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPRS Harta Insan Karimah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak-pihak lain sehingga insan BPRS HIK tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang diberikan BPRS kepadanya.

BPRS Harta Insan Karimah telah memiliki kode etik penanganan benturan kepentingan perusahaan yang menjadi ketentuan dan/atau panutan nilai dalam penanganan benturan kepentingan di dalam Perusahaan.

Selama tahun 2023 PT BPRS Harta Insan Karimah Tidak Memiliki Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan**)		Pengambil Keputusan*)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan ***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

P. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama Tahun 2023 PT BPRS Harta Insan Karimah tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu, sedangkan penyaluran dana untuk kegiatan sosial di jelaskan sebagai berikut :

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	4 April 2023	Santunan Anak Yatim Pemberian paket sembako dan uang tunai yang ditujukan untuk anak yatim agar mereka turut merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.	Anak yatim di sekitar seluruh Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPRS HIK	22.500.000
2	11 April 2023	Paket Ramadan Bahagia Pemberian paket sembako yang diperuntukan untuk kaum Dhuafa/ Mustahik (orang yang berhak menerima sesuai dengan kriteria / Asnaf), yang bekerjasama dengan Baznas Kota Tangerang.	Mustahik di sekitar seluruh Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPRS HIK	22.500.000

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
3	13 April 2023	Bantuan Guru Ngaji Disabilitas Pemberian paket sembako dan uang tunai untuk Guru Ngaji Disabilitas	Guru Ngaji Disabilitas di sekitar Unit Kerja BPRS HIK KC Jaktim	18.103.000
4	13 April 2023	Santunan Anak Yatim Melalui Program Ramadhan BeKen Pemberian paket sembako dan uang tunai untuk anak yatim yang diundang ke masing-masing Unit Kerja BPRS HIK bersamaan dengan agenda Bukber di masing-masing Unit Kerja	Seluruh Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPRS HIK	11.280.000
5	13 & 14 April 2023	Bantuan Beras untuk Ponpes Mitra HIK Ponpes As-Sholatiyah, Riyadhul Habaib, Panti YPMS, Musryidul Falah, Yayasan Alqi, Yayasan Umar Bin Khattob & Ponpes Nurussa'adah	Yayasan, Pondok Pesantren Mitra HIK	13.000.000
6	18 April 2023	Donasi untuk Graha BPRS Indonesia a. Dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah, khususnya dakwah di industri BPRS, didirikan kantor Kesekretariatan dan pusat kegiatan BPRS untuk Seluruh Indonesia melalui pendirian Graha BPRS Indonesia. b. Pemberian donasi untuk pembelian inventaris, infrastruktur, biaya operasional dan kebersihan Graha BPRS Indonesia.	Graha BPR Syariah Indonesia	15.000.000
7	18 April 2023	Donasi untuk Rumah Peradaban a. Dalam rangka pengembangan keuangan sosial lainnya, BPRS HIK juga turut serta dalam pengembangan keuangan sosial dan dakwah melalui pendirian Rumah Peradaban sebagai Sekretariat HMI FE UGM yang diinisiasi oleh YAHMI yang merupakan yayasan uang menginisiasi pendirian grup BPRS HIK.	Rumah Peradaban	15.000.000

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		b. Pemberian donasi untuk pembelian inventaris, infrastruktur, biaya operasional dan kebersihan Rumah Peradaban.		
8	Juni 2023	GaSSebu Qurban Day Distribusi hewan qurban (6 ekor kambing) untuk Masyarakat sekitar Unit Kerja BPRS HIK yang disalurkan melalui Masjid/ Mushola sekitar Unit Kerja BPRS HIK	Masyarakat kurang mampu di sekitar Unit Kerja BPRS HIK	21.200.000
9	30 Juni 2023	HIK Qurban Day Pemberian hewan qurban (1 ekor sapi) yang diberikan kepada Ponpes Mitra HIK (Yayasan Al-Qi Ceria Bogor)	Anak Yatim dan kurang mampu di Yayasan / Ponpes Al-Qi Ceria Bogor	24.500.000
10	17 Juli 2023	Santunan Yatim (Agenda Muharram) Pemberian santunan yang ditujukan untuk Anak Yatim di sekitar Kantor BPRS HIK	Anak yatim di sekitar seluruh Unit Kerja/ Jaringan Kantor BPRS HIK	15.000.000
11	26 Oktober 2023	Donasi Bantuan untuk Palestina Donasi untuk membantu rakyat Palestina yang bekerjasama dengan MER-C melalui kolaborasi dengan ASBISINDO.	Bantuan untuk rakyat Palestina	20.000.000
12	04 Desember 2023	Donasi Bantuan untuk Palestina Donasi untuk membantu rakyat Palestina yang bekerjasama Induk HIK untuk disalurkan melalui Baznas.	Bantuan untuk rakyat Palestina	5.000.000
13	2023	Pemberian Beasiswa untuk TA 2022-2023 Beasiswa untuk siswa kurang mampu yang termasuk golongan fakir/miskin/ dan berprestasi.	Sekolah/ Yayasan Pendidikan Mitra BPRS HIK	139.440.000
14	2023	Bantuan untuk Proposal Permohonan Bantuan untuk kegiatan-kegiatan seperti: renovasi bangunan masjid/ mushola, maulid nabi, isro miraj, santunan anak yatim & lebaran, baksos, pengadaan sarana prasarana masjid/ mushola.	Anak yatim , masyarakat sesuai dengan tujuan proposal	89.098.603



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan

Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tangerang, 30 Januari 2024

PT BPRS Harta Insan Karimah

Direktur Utama

Handwritten signature of Alfi Wijaya and a circular official stamp of PT BPRS Harta Insan Karimah Pusat.

Alfi Wijaya

Komisaris Utama

Handwritten signature of Zahrul Hadiprabowo.

Zahrul Hadiprabowo

Kantor Pusat
Menara HIK,
Jl. WIS Galconmesta No. 17
Karang Timur, Karang Tengah,
Tangerang
Telp. (021) 730 1456
Fax (021) 731 2481

Cabang Cibiru
Menara HIK J
Jl. WIS Galconmesta No. 17
Karang Timur, Karang Tengah,
Tangerang
Telp. (021) 730 1456
Fax (021) 731 2481

Cabang Cikarang
Jl. St. Martodirejo No. 15
Karang Baru, Cikarang
Bekasi
Telp. (021) 890 9444
Fax (021) 891 3977

Cabang Karawang
Ruko Masrid No.18 Palem Serpi
Jl. Imam Bonjol Penunggangon
Cibadus, Tangerang
Telp. (021) 8973 0949
Fax (021) 8977 0204

Cabang Jakarta Timur
Ruko Pondok Dewa Indah,
Jl. Raya Pondok Dewa No. 16
Lubang Buaya, Jakarta Timur
Telp. (021) 8779 2480
Fax (021) 8849 8095

Cabang Jakarta Barat
Ruko Duta Indah Alpha 2
Blok D No. 02
Jl. Peta Selatan, Kaldesa,
Jakarta Barat
Telp. (021) 8433 7252
Fax (021) 8433 7206

Kan Pamulang
Jl. Selatbaru Kav. 71 No. 10
Pamulang Timur,
Tangerang Selatan
Telp. (021) 742 5806
Fax (021) 742 9804

Kan Harappi Indah
Ruko Permata Harappi Bona,
Jl. Rejang Raya
Blok H2 Kav. Pejuang,
Kec. Medan Satria Bekasi
Telp. (021) 2219 3522
Fax (021) 2219 3022

Kantor Kan Cikupa
Ruko Citra Hengas Mas
No. C 29
Jl. Raya Serang KM 15
Tangerang
Telp. (021) 5940 4333
Fax (021) 5940 4898

Kan Depok
Ruko Sukamulya, Jl. Tole Wikandor,
Mekar Jaya
Sukmajaya, Kota Depok
Jawa Barat 1648
Telp. (021) 7780 0241
Fax (021) 2299 3601

email : info@bprshik.co.id

website : www.bprshik.co.id



Bismillahirrahmanirrahim

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assesment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620012
 Nama BPRS : PT BPRS Harta Insan Karimah
 Jenis BPRS : BPRS C
 Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,44	Sangat Baik
ANALISIS	
<p>Berdasarkan hasil <i>self-assessment</i>, penerapan Tata Kelola BPRS Harta Insan Karimah telah cukup memenuhi persyaratan Tata Kelola yang ditetapkan dalam POJK 24/POJK.03/2018, sebagai berikut :</p> <p>I. Kesesuaian Saat Ini</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan jumlah Modal Inti BPRS HIK (mulai dari Rp 50 milyar), telah terpenuhi kelengkapan struktur Tata Kelola yakni Formasi 3 (tiga) Anggota Direksi yang salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Formasi 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris yang 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen dan Formasi 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Telah terbentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Telah terlaksananya aktivitas proses Tata Kelola berupa Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Pengawasan Kepatuhan Syariah oleh DPS. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan, dan di hasilkan berbagai dokumen termasuk kewajiban Pelaporan ke Regulator sebagai bentuk proses dan hasil Tata Kelola. <p>II. Identifikasi Masalah BPRS HIK masih dalam tahap penyelesaian beberapa Prosedur dan perbaikan ketentuan serta Tools kerja lainnya.</p> <p>III. Rencana Tindak Lanjut Akan dilakukan penyelesaian beberapa Prosedur dan perbaikan ketentuan serta Tools kerja lainnya.</p>	

Tangerang, 30 Januari 2024

PT BPRS Harta Insan Karimah

Direktur Utama



Alfi Wijaya



Komisaris Utama



Zahrul Hadiprabowo

Kantor Pusat
 Menara HIK,
 Jl. HGS Cakrawala No. 17
 Karang Timur, Karang Tengah,
 Tangerang
 Telp. (021) 730 1456
 Fax. (021) 731 2491

Cabang Cikarang
 Menara HIK 2,
 Jl. HGS Cakrawala No. 17
 Karang Baru, Cikarang,
 Bekasi
 Telp. (021) 890 3144
 Telp. (021) 730 1456
 Fax. (021) 731 2491

Cabang Cikarang
 Jl. RE. Merduadana No. 10
 Karang Baru, Cikarang,
 Bekasi
 Telp. (021) 890 3144
 Fax. (021) 891 3977

Cabang Karawang
 Bulak Masjid No. 18 Jalan Senei
 Jl. Imam Bonjol Panunggangan
 Cikarang, Tangerang
 Telp. (021) 8073 0849
 Fax. (021) 5677 0224

Cabang Jakarta Timur
 Ruko Mendek Sude Indah,
 Jl. Raya Pondok Gede No. 18
 Lingsar Bulaya, Jakarta Timur
 Telp. (021) 8770 2810
 Fax. (021) 8490 8265

Cabang Jakarta Barat
 Ruko Duta Rupa Alashe 2
 Blok D No. 02
 Jl. Peta Selatan, Kembangan,
 Jakarta Barat
 Telp. (021) 5433 2252
 Fax. (021) 5433 2250

Kas Purmerang
 Jl. Setiabudi Kav. 71 No. 10
 Purmerang Timur,
 Tangerang Selatan
 Telp. (021) 742 9034
 Fax. (021) 742 9034

Kas Harapan Indah
 Ruko Permata Harmoni Blok
 No. C. 23
 Jl. Pejasing Raya,
 Blok 113 LK, Pejasing
 Kas. Medan Satria, Bekasi
 Telp. (021) 228 3152
 Fax. (021) 228 3621

Kantor Kas Cikupa
 Ruko Cikupa Hoega Mon
 No. C. 23
 Jl. Raya Serang KM 15
 Tangerang
 Telp. (021) 5140 4333
 Fax. (021) 5140 4818

Kas Depok
 Ruko Surogaya Jl. Tole Iskandar,
 Mekor Jaya
 Sukmajaya, Kota Depok,
 Jawa Barat 1648
 Telp. (021) 7782 0249
 Fax. (021) 2465 8601

email : info@bprshik.co.id

website : www.bprshik.co.id